

**USULAN  
HIBAH PUNDAMENTAL**



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG  
RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA  
(STUDI KASUS DI KOTA PALEMBANG)**

**TIM PENGUSUL**

**AHMMAD YANI RANIUS, S.KOM,MM      NIDN : 0210116701**  
**HERIYANTO, S.E., M.SI                      NIDN : 0225036301**

**UNIVERSITAS BINA DARMA  
MEI 2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN FUNDAMENTAL**

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Publik Tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kota Palembang)

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 458/Teknik Informatika

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : AHMAD YANI RANIUS S.Kom, M.M.

b. NIDN : 0210116701

c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Program Studi : Teknik Informatika

e. Nomor HP/Surel : 081377747173/ay\_ranius@binadarma.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : HERIYANTO S.E., M.Si

b. NIDN : 0225036301

c. Perguruan Tinggi : Universitas Bina Darma

Lama Penelitian Keseluruhan : 2 tahun

Usulan Penelitian Tahun ke- : 1

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 177,500,000.00

Biaya Penelitian

- diusulkan ke DRPM : Rp 95,000,000.00

- dana internal PT : Rp 0.00

- dana institusi lain : Rp 0.00 /in kind tuliskan: 0

Kota Palembang, 30-05-2016

Mengetahui,

Dekan-Fak. Ilmu Komputer

  
  
(M. Izman Herdiansyah, S.T., M.M., Ph.D.)  
NIP/NIK 990109088

Ketua Peneliti

  
( AHMAD YANI RANIUS S.Kom, M.M.)  
NIP/NIK 990102059

Menyetujui,

Direktur LPPM

  
  
(Dr. H. Hardiyansyah., M.SI)  
NIP/NIK 196610181992031008

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	1
BAB I. Pendahuluan .....	2
BAB II. Tinjauan Pustaka.....	8
2.1 Konsep Dasar Kebijakan Publik .....	8
2.2 Konsep Dasar Pedagang Kaki Lima .....	1
2.3 Kebijakan mengenai PKL .....	16
2.4 Penerapan Kebijakan Publik tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima di Palembang .....	17
BAB III. Metode Penelitian .....	18
3.1. Rancangan penelitian .....	18
3.2. Langkah-langkah Penelitian.....	19
3.3. Teknik Analisis Data.....	20
BAB IV. Jadwal dan Biaya Penelitian .....	21
Daftar Pustaka .....	26
LAMPIRAN	

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menerapkan dan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Publik Pemerintah Kota Palembang dalam melakukan relokasi Pedagang Kaki Lima di kota Palembang. Masalah kebijakan ini merujuk pada kebijakan publik yaitu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan publik pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas yang menurut Werf (1997) adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah menurut Werf (1997) mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat peranan PKL (pedagang Kaki Lima) berperan sangat penting dalam membuka kesempatan kerja dan merupakan profesi yang dapat mendukung bagi perusahaan-perusahaan berskala besar yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu Negara. Untuk dapat bertahan dalam lingkungan yang semakin kompetitif, Pedagang Kaki Lima (PKL) dituntut untuk semakin meningkatkan kinerjanya melalui kemampuan dalam bidang teknologi informasi dan peningkatan kemampuan dan pemahaman terhadap implementasi kebijakan publik. Untuk itu penelitian ini akan dilakukan dengan dua tahapan. Tahap pertama adalah menganalisis dan membangun jaringan IT (Teknologi Informasi) Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), tahap kedua menerapkan dan mengevaluasi terhadap penggunaan IT (teknologi Informasi) bagi PKL.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Relokasi, Pedagang Kaki Lima, Teknologi Informasi.

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Letak geografis Indonesia yang berupa kepulauan sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemerintahan negara Indonesia. Dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit mengatur pemerintahan yang ada di daerah. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukan adanya berbagai suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri tetapi tetap dibawah pengawasan dari pemerintah pusat. Di era reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkan cepatnya penyaluran keinginan dan hasrat rakyat di daerah, namun itu juga tetap dibawah pengawasan pemerintah pusat. Hal tersebut sangat diperlukan karena mulai terdapat munculnya ancaman-ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sumber daya alam dan manusia di daerah Indonesia yang tidak merata juga merupakan salah satu penyebab diperlukannya suatu sistem pemerintahan yang mampu mengelola sumber daya alam dan manusia yang dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah sekaligus menjadi pendapatan nasional. Masalah kebijakan merupakan sebuah fenomena yang menarik karena tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kali kebijakan pemerintah justru menimbulkan masalah baru didalam masyarakat. Hal tersebut terutama terjadi karena ketidakserasian antara isi kebijakan dengan praktek dilapangan. Masalah kebijakan ini merujuk pada kebijakan publik yaitu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan publik pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas yang menurut Werf (1997) adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran

tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah menurut Werf (1997) mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Kebijakan pemerintah dibuat agar hidup masyarakat dapat teratur dan terorganisir dengan baik.

Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut: “Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut azas dan otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dari definisi yang dikemukakan tersebut, maka pemerintahan daerah mengurus masalah yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD. Melalui kebijakan pemerintah yang jelas dan pengembangan sumber daya manusia yang baik maka permasalahan sosial dalam masyarakat dapat dihindarkan. Selain itu ruang partisipasi yang dibuka seluas-luasnya dan adanya hubungan dialogis yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, maka akan menimbulkan sinergi yang baik dalam menghasilkan ataupun melaksanakan sebuah kebijakan publik.

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) juga merupakan hal menarik dan cukup menyita perhatian pemerintah. PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban seperti di lalu lintas, membuat jalanan menjadi tercemar, menimbulkan

kerawanan sosial dan mengganggu ketertiban tata ruang kota. Sebagai pembuat kebijakan pemerintah harus bersikap arif dalam menentukan kebijakan sebab PKL merupakan salah satu sektor informal yang dominan di daerah perkotaan, sebagai wujud kegiatan ekonomi skala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa. Barang-barang yang dijual PKL lebih banyak berkategori makanan dan souvenir. PKL menjajakan dagangannya berkeliling atau mengambil tempat di trotoar dan pinggiran toko. PKL adalah sektor kegiatan informal dengan ciri-ciri (Bukhari Alma, 2011): tidak terorganisasi secara baik, tidak memiliki izin usaha yang sah, pola kegiatan tidak teratur (tidak ada jam kerja), usahanya tidak kontinyu (mudah berganti usaha), modal usaha relatif kecil (barang dagangan milik sendiri ataupun milik orang lain), teknologi yang digunakan sangat sederhana, dan umumnya tingkat pendidikan rendah.

Sejak terjadinya krisis ekonomi, pembangunan perekonomian daerah mengalami hambatan dan keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan modal, kemitraan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Seiring dengan hal tersebut perkembangan daerah perkotaan dan pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan sarana prasarana dalam jumlah yang banyak, sehingga masyarakat kelompok menengah kebawah mengambil alternatif untuk berprofesi sebagai PKL. Berkembangnya PKL juga dianggap sebagian kalangan dipicu oleh gagalnya pemerintah membangun ekonomi sehingga tidak berkembangnya usaha-usaha di sektor riil. Pada akhirnya hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah PKL.

Efek yang ditimbulkan dari keberadaan PKL ini dengan pola ketidakteraturannya akhirnya menciptakan kawasan kumuh, tidak rapi, kemacetan

lalu lintas dan berkurangnya keindahan atau estetika kota. Permasalahan PKL ini diperparah oleh arus migrasi yang tidak pernah berhenti dari desa ke kota. Kebijakan demi kebijakan telah diterapkan pemerintah namun seringkali belum menampakkan hasil yang memuaskan. Pemerintah kota Palembang sebagai salah satu pemerintah daerah yang juga mengalami hal tersebut telah berupaya melakukan beberapa hal diantaranya menempatkan PKL atau “**relokasi**” pada kawasan khusus dan membantu pendanaannya. Melalui Dinas Koperasi dan Sektor Informal, Pemerintah Kota Palembang telah melakukan pendataan, penataan, pemberian modal bergulir hingga pelatihan kerja. Namun demikian beberapa kalangan masih menganggap upaya tersebut terkesan setengah-setengah. Akibatnya, upaya penertiban seringkali berujung pada bentrokan dan perlawanan fisik dari PKL. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL justru melakukan unjuk rasa menghujat kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat miskin. Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan publik dalam hal relokasi pedagang kaki lima di kota Palembang. Peneliti berencana melakukan penelitian dengan judul **Implementasi kebijakan publik dalam hal relokasi pedagang kaki lima di Palembang**. Dengan penelitian ini diharapkan diperoleh masukan dalam pengembangan kebijakan publik di masa depan

### **1.1. Permasalahan penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk menarik permasalahan yang dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan kebijakan publik dalam pedagang kaki lima di Kota di Palembang?



2. Hal-hal apa yang menjadi kunci keberhasilan penerapan kebijakan tersebut?

### **1.2.Tujuan Penelitian**

1. Penerapan kebijakan publik dalam pedagang kaki lima di Kota di Palembang.
2. Mengetahui implementasi kebijakan publik serta Literasi teknologi bagi PKL (pedangang kaki lima,) di kota Palembang

### **1.3 Manfaat Penelitian**

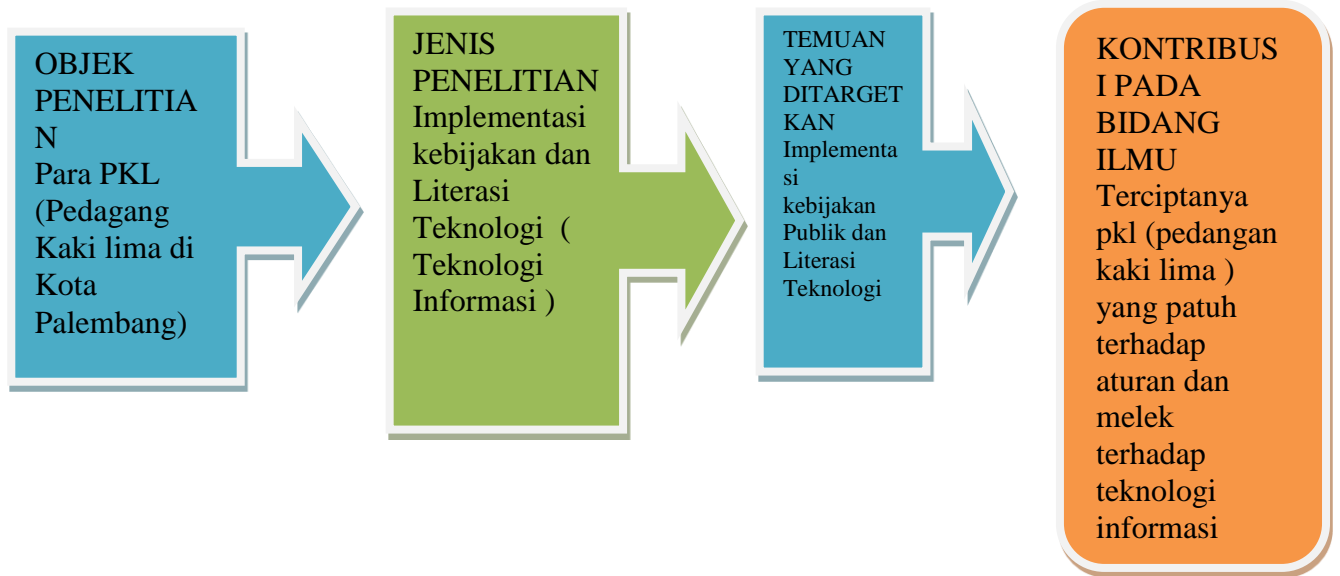
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pemerintah sebagai informasi dalam menambil keputusan, menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah konkrit dalam pembinaan pedagang kaki Lima di kota Palembang dan pemerintah Indonesia umumnya. Disamping itu penelitian ini juga bermanfaat sebagai informasi dalam menentukan program pengembangan Pedagang Kaki Lima di kota Palembang dan Kota-Kota lain di Indonesia.

### **1.4 Luaran**

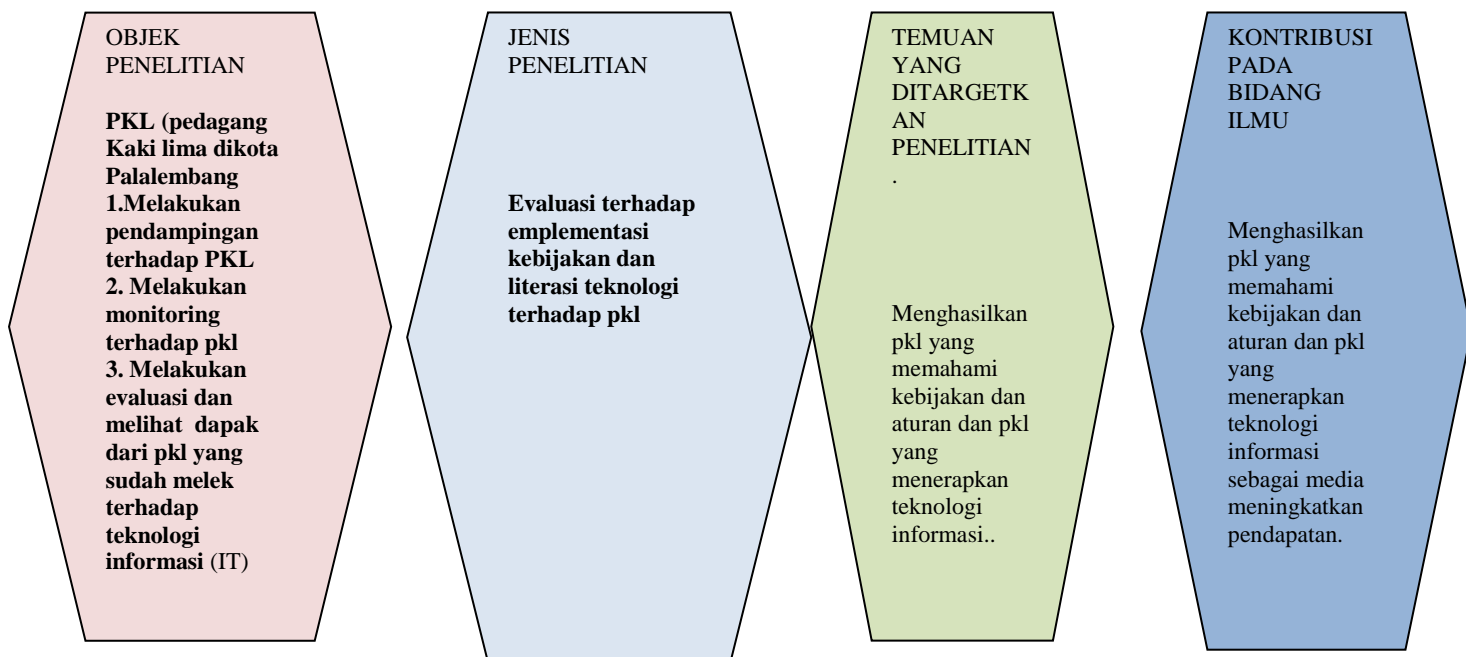
Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa poin penting antara lain :

1. Menghasilkan laporan penelitian yang akan dipublikasikan dalam sebuah jurnal nasional yang terakreditasi.
2. Membangun jaringan Pedangang Kaki lima berbasisan teknologi informasi
3. Menghasilkan Pedagang Kaki Lima yang sukses berwirausaha dengan kompetensi yang berkualitas.
4. Menghasilkan laporan penelitian yang akan diseminarkan di Seminar Nasional dan akan diterbitkan dalam sebuah prosiding yang ber-ISBN.

**Tahap yang dilakukan tahun pertama (1)**



**Tahap yang dilakukan pada tahun kedua (2)**



## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Konsep Dasar Kebijakan Publik**

#### **2.1.1. Definisi kebijakan publik**

Dye dalam wahab (2014:14) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dye juga mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kepastian tindakannya, bukan sebatas pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Baik sesuatu yang ditetapkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah atau yang tidak dilaksanakan pemerintah keduanya termasuk dalam kebijakan pemerintah oleh karena itu akan memiliki pengaruh atau dampak pada masyarakat atau publik. Beberapa ahli lain seperti Udoji mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat, sedangkan Lemieux merumuskan kebijakan publik sebagai produk aktivitas – aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur dan berlangsung sepanjang waktu (wahab, 2014: 15). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang ditetapkan pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan cara cara tertentu untuk tujuan memecahkan masalah tertentu secara terstruktur dan berkelanjutan.

#### **2.1.2. Alasan dibuatnya kebijakan publik**

Kebijakan publik pada prinsipnya adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu secara sistematis oleh

pemerintah. Oleh karena itu menurut Anderson dalam wahab (2014: 20) kebijakan publik memiliki implikasi antara lain:

1. Bahwa kebijakan pemerintah itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan .
2. Bahwa kebijakan pemerintah berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat.
3. Bahwa kebijakan pemerintah adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud ingin melakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijakan pemerintah bersifat positif, yang merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu sesuatu.
5. Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Sedangkan menurut UUD 1945 tujuan dari pembuatan kebijakan adalah sesuai dengan yang dicita-citakan atau diharapkan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsep dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik

Indonesia adalah untuk memberikan kemakmuran pada seluruh masyarakat yang ada di dalamnya, hal ini sesuai dengan konsep dasar Negara Kesejahteraan.

### **2.1.3. Ciri - Ciri Kebijakan Publik**

Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas dalam artian ia mempunyai ciri – ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang memiliki otoritas dalam sistem politik Easton dalam Wahab (2014:17). Dalam sistem politik masyarakat tradisional yang sederhana contohnya para ketua adat atau ketua suku. Sedangkan di sistem politik atau masyarakat modern yang kompleks, mereka itu adalah para eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarki, dan sejenisnya. Mereka inilah merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat langsung dalam urusan-urusan politik dan dianggap oleh sebagian besar warga sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan bertanggung jawab atas urusan-urusan politik.

### **2.1.4. Implementasi Kebijakan**

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2014), menjelaskan makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Implementasi kebijakan dapat pula dianggap sebagai suatu proses, serangkaian keputusan dan

tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya (Wahab: 2014).

Tenik- teknik implementasi kebijakan publik (Wahab:2014) yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan perintah kendali yaitu secara kental bertumpu pada mekanisme birokrasi, melibatkan penerapan mekanisme yang agak memaksa. Misalnya, penerapan standar tertentu, inspeksi ketat dari aparat birokrasi, dan pengancaman dengan sanksi tertentu bagi para pelanggar yang gagal mematuhi aturan hukum terkait.
2. Pendekatan insentif ekonomi yang berbasis pada kekuatan pasar yaitu sebaliknya lebih lentur melibatkan penggunaan nilai pajak, subsidi atau pemberian ganjaran tertentu (reward), maupun bentuk hukuman lain untuk mendorong agar pihak swasta/individu mematuhi hukum yang berlaku.

#### **2.1.5. Tujuan dan Pentingnya Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi dalam penggunaannya yang paling umum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan nilai (value). Dengan demikian evaluasi merupakan bagian dari setiap analisis untuk keputusan publik. Istilah evaluasi dipergunakan dalam arti lebih terbatas dan teknis sebagai suatu penyelidikan untuk mengukur betapa baik penyelesaian yang sesungguhnya dari suatu program yang sedang berlangsung (atau kurang sering, program yang sudah selesai) sesuai dengan penyelesaian yang diharapkan (Moekijat, 1995: 180)

Tujuan dari evaluasi kebijakan ini menurut Moekijat (2011: 184), yaitu:

1. Evaluasi untuk mempengaruhi alokasi sumber, maksudnya untuk mengukur nilai atau keefektifan program atau proyek yang sedang

berlangsung guna membantu menentukan dana (atau mungkin sumber-sumber lain) yang akan diberikan.

2. Evaluasi untuk memperbaiki operasi sering dilakukan internal, karena maksudnya adalah untuk menyelidiki perubahan-perubahan yang mungkin dalam program dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan, bukan untuk melihat bagaimana program bekerja dibandingkan dengan program-program yang sama atau dalam arti yang mutlak.

#### **2.1.6. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik**

Edward A. Suchman (winarno, 2005) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standardisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Samodra dalam Nugroho (2004), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasiksi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

## **2.2. Konsep Dasar Pedagang Kaki Lima (PKL)**

### **2.2.1 Definisi pedagang kaki lima**

Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

PKL merupakan salah satu bentuk dari usaha disektor informal. Alisjahbana (2006) mengemukakan bahwa Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak, dan menggelar dagangannya di ruang publik, seperti trotoar, pinggir jalan



atau juga di bantaran kali. Sektor informal sendiri merupakan tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak. Definisi lainnya adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak memiliki keamanan kerja (*job security*), tidak permanen dan unit usaha atau lembaganya tidak berbadan hukum. Menurut ahli yang lain pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal kota yang mengembangkan aktifitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar (Evers dan Korf:2002). Dari segi ekonomi tentunya jelas dapat dilihat bahwa dengan adanya PKL maka dapat membantu pekerja sector informal untuk mendapatkan penghasilan. Dari segi sosial dapat dirasakan bahwa keberadaan PKL dapat menghidupkan dan meramaikan suasana dan seringkali menjadi daya tarik tersendiri dari segi budaya.

### **2.2.2. Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima**

Beberapa karakteristik khas pedagang kaki lima dikemukakan oleh (Suyanto: 2005) adalah sebagai berikut:

1. Pola persebaran kaki lima umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa izin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik.
2. Para pedagang kaki lima umumnya memiliki daya resistensi sosial yang sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban.
3. Sebagai sebuah kegiatan usaha, pedagang kaki lima umumnya memiliki mekanisme involutif penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar.

4. Sebagian besar pedagang kaki lima adalah kaum migran, dan proses adaptasi serta eksistensi mereka didukung oleh bentuk-bentuk hubungan patronase yang didasarkan pada ikatan faktor kesamaan daerah asal
5. Para pedagang kaki lima rata-rata tidak memiliki ketrampilan dan keahlian alternatif untuk mengembangkan kegiatan usaha baru luar sektor informal kota.

**Sedangkan menurut Kartono (1980) pedagang kaki lima, yaitu:**

- 1) Merupakan pedagang yang kadang- kadang juga sekaligus berarti produsen;
- 2) Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang);
- 3) Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran;
- 4) Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya;
- 5) Kualitas barang- barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar;
- 6) Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah;
- 7) Usaha skala kecil bisa berupa family enterprise, dimana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung;

- 8) Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima;
- 9) Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman.

### **2.3. Kebijakan mengenai PKL**

Berkembangnya PKL dianggap beberapa kalangan dipicu oleh gagalnya pemerintah membangun ekonomi sehingga tidak berkembangnya usaha –usaha di sektor riil yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Pemerintah sering melakukan penertiban PKL dengan melakukan pengusuran sebagai upaya menciptakan ketertiban namun tidak disertai dengan upaya menciptakan lahan baru yang strategis sebagai penggantinya karena anggapan bahwa PKL adalah bisnis yang illegal. Bagaimanapun juga PKL adalah juga warga negara yang harus dilindungi hak-haknya, hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul. Seperti tercantum dalam UUD 45 Pasal 27 ayat (2): “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan pasal 13 UU Nomor 09/1995 tentang usaha kecil : “Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentral industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Fenomena PKL dan masalah – masalah yang ditimbulkan PKL seperti yang telah diuraikan di atas, dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib. Meskipun pemerintah telah membuat kebijakan Perda untuk melarang keberadaan PKL, faktanya jumlah PKL malah semakin banyak. Bahkan kebijakan Perda tersebut menuai banyak kontra dari para PKL karena kebijakan pemerintah itu dianggap tidak tepat, tidak adil dan merugikan para PKL. Kemudian yang menambah daftar panjang permasalahan PKL ini adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam praktiknya banyak menggunakan kekerasan. Pendekatan kekerasan yang akan dilakukan pemerintah justru akan menjadi *boomerang* bagi pemerintah itu sendiri, sehingga akan timbul ketidakstabilan, anarkisme dan ketidaktentraman yang dampaknya justru akan menurunkan citra pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

#### **2.4. Penerapan Kebijakan Publik tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima di Palembang**

Definisi Relokasi berdasarkan Kamus Besar Indonesia diartikan sebagai perpindahan atau pemindahan lokasi, baik suatu industri ataupun tempat berdagang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan alasan-alasan tertentu. Definisi lain dari relokasi yaitu sebuah perubahan di fisik lokasi dari sebuah bisnis. Sebuah bisnis mungkin merelokasi bisnisnya karena meningkatnya biaya pada saat pengadaan fasilitas, karena keringanan pajak di lokasi yang berbeda, perubahan pasar sasaran atau untuk alasan lain. Jadi relokasi yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah tindakan pengalihan tempat perusahaan beroperasi dari satu lokasi fisik yang lain.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menangani masalah relokasi PKL Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan beberapa kebijakan yang isinya, antara lain:

- 1) Pedagang Kaki Lima dipindah lokasikan ke tempat yang telah disediakan berupa kios-kios.
- 2) Kios kios tersebut disediakan secara gratis.
- 3) Setiap kios setiap bulan ditarik retribusi.
- 4) Bagi Pedagang yang tidak pindah dalam jangka waktu 90 hari setelah keputusan ini dikeluarkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah kota menilai kebijakan relokasi tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi PKL dan memudahkan PKL. Dengan adanya kios – kios yang disediakan pemerintah, pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan, dan kemudahan modal usaha. Pemerintah merasa telah melakukan hal yang terbaik dan bijaksana dalam menangani keberadaan PKL. Namun, Pasca relokasi tersebut, beberapa pedagang kaki lima

yang diwadahi dalam suatu paguyuban melakukan berbagai aksi penolakan terhadap rencana relokasi ini.

### **KONTRIBUSI PENELITIAN**

Melalui penelitian ini diharapkan menjadi masukan secara khusus untuk mengatasi masalah PKL dan masukan bagi Pemerintah dalam memperbaiki implementasi suatu kebijakan publik terutama yang menyangkut pedagang kaki lima, agar para PKL (pedangang kaki lima) melek terhadap teknologi Informasi (IT).

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Rancangan Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan desain kualitatif. Dalam melakukan analisa implementasi kebijakan publik akan dilakukan wawancara mendalam terhadap informan. Informan dalam penelitian ini adalah staf pada dinas terkait di pemerintah kota Palembang dan pelaku pedagang kaki lima (PKL). Wawancara mendalam dilakukan untuk dapat memberikan informasi mengenai kebijakan publik terkait relokasi PKL , meliputi:

1. Kebijakan pemerintah daerah terhadap pedagang kaki lima
2. Tujuan Pemerintah Daerah melakukan relokasi pada Pedagang Kaki Lima
3. Upaya Pemerintah Daerah dalam memotivasi Pedagang Kaki Lima agar mereka mau mengikuti kebijakan dari Pemerintah.
4. Fasilitas yang disediakan dalam kebijakan relokasi.
5. Masalah yang dihadapi oleh Pedagang Kaki Lima setelah dilakukan relokasi seperti masalah penurunan tingkat pendapatan setelah direlokasi tempat usahanya.
6. Manfaat dan hasil yang didapatkan oleh pedagang kaki lima yang direlokasi tempat usahanya.

### **3.2. Langkah – Langkah Penelitian**

1. Persiapan
  - 1.1 Penentuan Objek Penelitian.
  - 1.2 Penentuan Informan.
  - 1.3 Perancangan Instrumen Penelitian.
2. Pelaksanaan

- 2.1. Wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan.
- 2.2. Mengumpulkan data.
- 2.3. Menganalisis data melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data.

### 3. Pelaporan

- 3.1 Hasil Analisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif akan disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian
- 3.2. Revisi hasil penelitian setelah dilakukan seminar hasil penelitian

## **3.2 Teknik Analisis Data**

### **3.2.1. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah proses pengumpulan data selesai maka data tersebut dapat diolah. Data penelitian ini dimulai mendokumentasikan data dengan menata data-data hasil wawancara berupa rekaman pembicaraan, catatan lapangan, dan transkrip. Langkah berikutnya pemberian kode untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data untuk membedakan informasi dari masing-masing responden/informan. Pemberian kode berupa nama dari informan pada kata-kata kunci saat wawancara mendalam.

### **3.5.2. Prosedur Analisa Data**

Menurut Bungin (2011: 161), tujuan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut.
2. Menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena tersebut.



Pada penelian ini informasi segera dianalisis tanpa menunggu semua informan diwawancarai, informasi yang diperoleh dicatat dan direkam kemudian dibuat transkrip (menterjemahkan hasil wawancara dalam bentuk tulisan) dan matrik (tabel) setelah dikumpulkan berdasarkan pertanyaan dan tujuan peneliti. Informasi dianalisis secara manual yang disusun untuk menentukan alternatif pemecahan masalah.

## BAB IV. JADWAL DAN BIAYA PENELITIAN

### 4.1 Jadwal Penelitian tahun 1

No	Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan																
	a. Studi Literatur	■															
	b. Administrasi & surat menyurat	■	■														
	c. Sosialisasi dengan subjek penelitian			■	■												
	d. Mempersiapkan instrumen					■											
2	Pelaksanaan																
	a. Observasi						■										
	b. Wawancara						■										
	c. Pendokumentasian Data						■	■	■	■	■						
	d. Evaluasi Pelaksanaan										■						
	e. Input Data											■	■				
	f. Pengolahan & Analisis Data												■	■			
3.	Penyusunan Laboran Penelitian															■	
4	Seminar Hasil Penelitian																■

### 4.1 Jadwal Penelitian tahun 2

No	Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan																
	a. Studi Literatur	■															
	b. Administrasi & surat menyurat	■	■														
	c. Sosialisasi dengan subjek penelitian			■	■												
	d. Mempersiapkan instrumen					■											
2	Pelaksanaan																
	a. Observasi						■										
	b. Wawancara						■										
	c. Pendokumentasian Data						■	■	■	■	■						
	d. Evaluasi Pelaksanaan											■					
	e. Input Data												■	■			
	f. Pengolahan & Analisis Data													■	■		
3.	Penyusunan Laboran Penelitian															■	
4	Seminar Hasil Penelitian																■

## 4.2 Biaya Penelitian

### Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian tahun pertama (1)

Aspek Pembiayaan	Satuan Usaha		Satuan Waktu		Biaya Satuan	Jumlah
	Vol	Satuan	Vol	Satuan		
<b>1. Gaji dan Upah</b>						
Ketua Peneliti	1	Org	10	Bln	700.000	7.000.000
Anggota Peneliti	2	Org	10	Bln	475.000	9.500.000
					<b>Sub Total</b>	<b>16.500.000</b>
<b>2. Bahan Habis pakai dan Peralatan</b>						
ATK	1	Paket	10	Bln	275.000	2.750.000
Papan survey	1	paket	1	Bln	125000	125000
Komunikasi	1	Paket	10	Bln	300.000	3.000.000
Peralatan Survey	1	Paket	1	Kali	1.500.000	1.500.000
Penyusunan Angket	1	Paket	1	Kali	1.500.000	1.500.000
Penelusuran Pustaka	1	Paket	1	Kali	5.000.000	5.000.000
Rekapitulasi Data	1	Paket	1	Kali	2.500.000	2.500.000
Pengolahan Data	1	Paket	1	Kali	5.000.000	5.000.000
					<b>Sub Total</b>	<b>21.375.000</b>
<b>3. Transportasi dan Akomodasi</b>						
<b>a. Survey Data</b>						
- Ilir Timur I,II	3	Org	3	Hari	250.000	2.250.000
- Ilir Barat I,II	3	Org	3	Hari	250.000	2.250.000
- Sebrang Ulu I,II	3	Org	3	Hari	250.000	2.250.000
- Sukarame	3	Org	3	Hari	250.000	2.250.000
- Kemuning, Sako	3	Org	3	Hari	250.000	2.250.000
- Bukit Kecil, Gandus	3	Org	3	Hari	250.000	2.250.000
- Plaju, Kertapati	3	Org	3	Hari	200.000	1800.000
- Kalidoni	3	Org	3	Hari	200.000	1800.000
- Sematang	3	Org	3	Hari	250.000	2.250.000
					<b>Sub Total</b>	<b>19.350.000</b>
<b>4. Lain-Lain</b>						
<b>Biaya Pelaksanaan Seminar</b>						
a. Seminar Proposal	2	Paket	2	Hari		3.000.000
b. Sosialisasi IT/ FGD	150	Orang	4	Hari	1.500.000	15.000.000
c. Sewa lab komputer	150	orang	4	Hari		8.000.000
					250.000	
					2.000.000	
d. seminar Laporan Awal	2	Paket	2	Hari	2.750.000	5.500.000
e. Publikasi Ilmiah	1	Paket	1	Kali	4.000.000	4.000.000
f. Penyusunan Laporan	1	Paket	1	Kali	950.000	950.000
g. Penggandaan Laporan	1	Paket	1	Kali	950.000	950.000
					<b>Sub Total</b>	<b>29.400.000</b>
					<b>Grand Total</b>	<b>95.000.000</b>

### Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian (Untuk Tahun 2)

Aspek Pembiayaan	Satuan Usaha		Satuan Waktu		Biaya Satuan	Jumlah
	Vol	Satuan	Vol	Satuan		
<b>1. Gaji dan Upah</b>						
Ketua Peneliti	1	Org	10	Bln	700.000	7.000.000
Anggota Peneliti	2	Org	10	Bln	475.000	9.500.000
					<b>Sub Total</b>	<b>16.500.000</b>
<b>2. Bahan Habis pakai dan Peralatan</b>						
ATK	1	Paket	10	Bln	275.000	2.750.000
Komunikasi	1	Paket	10	Bln	300.000	3.000.000
Peralatan Survey	1	Paket	1	Kali	1.500.000	1.500.000
Penyusunan Angket	1	Paket	1	Kali	1.500.000	1.500.000
Penelusuran Pustaka	1	Paket	1	Kali	5.000.000	5.000.000
Rekapitulasi Data	1	Paket	1	Kali	2.500.000	2.500.000
Pengolahan Data	1	Paket	1	Kali	5.000.000	5.000.000
					<b>Sub Total</b>	<b>21.250.000</b>
<b>3. Transportasi dan Akomodasi</b>						
<b>b. Survey Data</b>						
- Ilir Timur I,II	2	Org	10	Hari	150.000	1.500.000
- Ilir Barat I,II	2	Org	10	Hari	150.000	1.500.000
- Sebrang Ulu I,II	2	Org	10	Hari	150.000	1.500.000
- Sukarame	2	Org	10	Hari	125.000	1.250.000
- Kemuning, Sako	2	Org	10	Hari	150.000	1.500.000
- Bukit Kecil, Gandus	2	Org	10	Hari	200.000	2.000.000
- Plaju, Kertapati	2	Org	10	Hari	150.000	1.500.000
- Kalidoni	2	Org	10	Hari	125.000	1.250.000
- Sematang	2	Org	10	Hari	125.000	1.250.000
					<b>Sub Total</b>	<b>13.250.000</b>
<b>4. Lain-Lain</b>						
<b>Biaya Pelaksanaan Seminar</b>						
h. Seminar Proposal	1	Paket	1	Hari	1500.000	1.500.000
i. Pelatihan IT	150	Orang	4	Hari	250.000	15.000.000
j. Honor instruktur IT	1	Orang	4	hari	500.000	2000.000
k. Seminar Laporan Akhir	2	Paket	2	Hari	3.750.000	7.500.000
l. Publikasi Ilmiah	1	Paket	1	Kali	4.000.000	4.000.000
m. Penyusunan Laporan	1	Paket	1	Kali	750.000	750.000
n. Penggandaan Laporan	1	Paket	1	Kali	750.000	750.000
					<b>Sub Total</b>	<b>30.000.000</b>
					<b>Grand Total</b>	<b>82.500.000</b>

## DAFTAR RUJUKAN

- Alma. Buchari. 2011. *Kewirausahaan*. Bandung : Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian kualitatif*. Jakarta : Kencana
- Moekijat.1995.*analisis kebijaksanaan publik*. Bandung : Mandar maju
- Moekijat. 2011. *Manajemen Finansial Perusahaan*. Edisi Pertama. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Sagala, Rivai. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sutrinno, Edi. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahab.2014.*analisis kebijakan*. Jakarta : Bumi aksara.
- Elmina, dan Tuti. 2013. Evaluasi penataan dan Pembinaan Pedagang. *Jurnal administrasi pembangunan*, (online) Volume 2 No 1 . Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru. (<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JAP/article/view/1933>) diakses tanggal 13 November 2014 jam 14 : 35 Wib
- Purwanti, Ema fitri. 2012. *Dampak Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Disekitar Alun-alun Kota Batu*. Skripsi (Online) <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/20373>
- Situmeang, Dina Fujisari. 2010. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima (Studi kasus pada Pedagang Kaki Lima di Depan Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan)*. Skripsi (Online) (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24406/7/Cover.pdf>). Diakses tanggal 10 November 2014. Jam 11 : 16 Wib.
- Werf, H. 1997. *Ilmu Manajemen Pemerintahan*. Jakarta.
- Undang-Undang, R. I. Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wibowo, DKK. 2010. *Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)*. Jurnal Skripsi, (Online), <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ad=rja&uact=8&ved=0CFkQFjAH&url=http%3A%2F%2Fstaff.unila.ac.id%2Fekobudisulistio%2Ffiles%2F2013%2F09%2FKebijakan-Penanganan-Pedagang-Kaki-Lima-di-Kota-Bandar-Lampung.doc&ei=amx->

[VLfWLI6yuATG-YG4BA&usg=AFQjCNHY5V9EA-ruZWMHeeFYW5RgkQvyoQ&bvm=bv.80642063,d.c2E](https://www.google.com/search?q=VLfWLI6yuATG-YG4BA&usg=AFQjCNHY5V9EA-ruZWMHeeFYW5RgkQvyoQ&bvm=bv.80642063,d.c2E). Diakses tanggal 10 November 2014. Jam 10 : 28

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. CV Cutra Media, Surabaya.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo, Jakarta.

## PERSONALIA PENELITIAN

### 1. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap dan Gelar : **Ahmad Yani Ranius, S.KOM, M.M.**
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Golongan Pangkat dan NIP : III/C/ Penata
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Jabatan Struktural : -
- f. Fakultas/Program Studi : Ilmu Komputer/Mana. Sist. Informasi
- g. Perguruan Tinggi : Universitas Bina Darma Palembang
- h. Bidang Keahlian/Disiplin Ilmu : Manajemen Sistem Informasi
- i. Waktu untuk Penelitian ini : 5 jam/minggu

### 2. Anggota Peneliti

- a. Nama Lengkap dan Gelar : **Heriyanto, S.E.,M.Si**
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Golongan Pangkat dan NIP : III/C /Penata
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Jabatan Struktural : -
- f. Fakultas/Program Studi : Ekonomi/Manajemen
- g. Perguruan Tinggi : Universitas Bina Darma Palembang
- h. Bidang Keahlian/Disiplin Ilmu : Ekonomi
- i. Waktu untuk Penelitian ini : 5 jam/minggu

## Lampiran 1. Curriculum Vitae

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA TIM

#### A. Curriculum Vitae

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	A. Yani Ranius, S.Kom., M.M
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor IIIc
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	990102059
5	NIDN	0210116701
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bunglai (OKU), 10 Nopember 1967
7	Email	<a href="mailto:yani_ranius@mail.binadarma.ac.id">yani_ranius@mail.binadarma.ac.id</a> , <a href="mailto:ay_ranius@yahoo.com">ay_ranius@yahoo.com</a> , <a href="mailto:ay_ranius@binadarma.ac.id">ay_ranius@binadarma.ac.id</a>
8	Nomor Telepon/HP	0813 7774 7173
9	Alamat Kantor	Jl. A. Yani No 3 Plaju Palembang
10	Nomor Telepon/Faks	0711515679
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1 : 34 Orang S2 : 0 S3 : 0
12	Mata Kuliah yg Diampu	1. Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak 2. Penulisan Ilmiah 3. Kewirausahaan

#### B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	STMIK Bina Darma	Universitas Bina Darma
Bidang Ilmu	Ilmu Komputer	Ilmu Komputer
Tahun Masuk-Lulus	1994 - 1998	2005 - 2006
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Sistem Informasi Alat Kotrasepsi Keluarga Berencana di Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan	Pengaruh Motivasi Kerja dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan Universitas Bina Darma.
Nama Pembimbing/Promotor	1. Dr. Surachman G, M.Sc 2. Helmi, SE, MM	1. Dr. Buyung Nasution, M.Sc 2. Fatoni, M.MSi

#### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2012	Evaluasi Penerimaan Teknologi Sistem Informasi Kepegawaian POLDA Sumsel Menggunakan Metode TAM ( <i>Technology Acceptance Model</i> )	Universitas Bina Darma	5.000.000
2	2014	Pemanfaatan e_learning sebagai media pembelajaran di Universitas Bina Darma	Universitas Bina Darma	1.000.000



**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2012	Pelatihan Penggunaan Internet di Yayasan Nurul Qomar.	Universitas Bina Darma	1.000.000
2	2012	Kelompok PNPM Mandiri Pariwisata se-Kota Palembang, 2012	Dinas Pariwisata Kota Palembang	1.000.000
3	2013	Pelatihan Pembuatan e_mail dan Blog Kepada Pegawai Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang	Universitas Bina Darma	1.000.000
4	2013	Narasumber Pada Acara Pembinaan Masyarakat Daerah Tujuan Wisata di Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kab. Banyuasin, 2013	Universitas Bina Darma	1.000.000
5	2013	Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Sederhana Menggunakan Aplikasi Komputer Bagi Pelaku Usaha di Danau OPI, 2013.	Universitas Bina Darma	1.000.000
6	2014	<i>Inhouse training</i> di Kantor Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Pali, 2014.	Universitas Bina Darma	1.000.000
7	2014	Pelatihan ICT sebagai Media Pembelajaran Berbasis IT Sebagai Penunjang Kurikulum 2013 untuk Guru SMA/SMK se- Kab. Banyuasin.	Universitas Bina Darma	1.000.000
7	2015	Pelatihan Blog untuk Media Pembelajaran Guna Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam Membuat Media Pembelajaran	Universitas Bina Darma	1.000.000

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Pemanfaatan e_learning sebagai media pembelajaran di Universitas Bina Darma	Matrik, Universitas Bina Darma	Vol.9 No.1 2011 ISSN: 1978-1520
2	Eksistensi Dosen Kewirausahaan UBD & Peluang Usaha Sektor Wisata Air	Tabloid B-Smart	Edisi XI, 15 Desember 2014
3	Kesiapan Pemberlakuan SKKNI Bidang Pariwisata	Koran Sindo	Edisi 14-17 Maret 2015

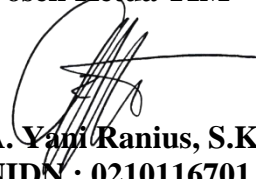
**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama pertemuan ilmiah/seminar	Judul artikel ilmiah	Waktu dan tempat
1	Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) 2013	Sistem Remedial Nilai Siswa SMA Olah Raga Negeri Sriwijaya Palembang Menggunakan J2ME	15 Juni 2013, Universitas Islam Indonesia

		dengan Metode Software System Methodology (SSM).	Yogyakarta.
2	Seminar Nasional Applied Business and Engineering Conference 2013 (ABEC)	Analisis SWOT Penyusunan Rencana Induk e-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.	Oktober 2013, Politeknik Negeri Batam
3	Digital Information System Conference 2014	Audit Tata Kelola Teknologi Informasi pada UPT-SIM Universitas Bina Darma Menggunakan Cobit 5.0.	September 2014, Universitas Kristen Maranatha Bandung
4	Digital Information System Conference 2014	Sistem Penunjang Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi Dengan Menggunakan Metode AHP.	September 2014, Universitas Kristen Maranatha Bandung
5	Seminar Nasional Sain dan Teknologi Informasi 2014 (SeNASTi)	Meningkatkan Motivasi Technopreneurship Sebagai Potensi Inovasi Mahasiswa Untuk Berbisnis	Mei 2014, STMIK Kharisma Makasar
6	Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2014	Hubungan Pemasaran Secara Online Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian.	Mei 2014, BSI Kaliabang Jakarta
7	Seminar Nasional Bisnis dan Teknologi (SEMBISTEK) 2014	Sistem Pendukung Keputusan Memilih Perguruan Tinggi Swasta di Palembang Sebagai Pilihan Tempat Kuliah.	Desember 2014, IBI Darmajaya Bandar Lampung
8	Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2015	Evaluasi Ketergunaan Sistem Informasi Monitoring Delivery Purchase Supplies (DPS) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang	Mei 2015, BSI Jakarta Timur
9	Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2015	Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Destinasi Wisata unggulan di Kota Palembang	Mei 2015, BSI Jakarta Timur
10	Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi di Industri (SENIATI) 2016	Evaluasi Manajemen Sistem Informasi Rawat Jalan Pada Rumah Sakit Umum Daerah BARI Palembang	Februari 2016, ITN Malang

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

**Dosen Ketua TIM**



**A. Yani Ranius, S.Kom., M.M**  
**NIDN : 0210116701**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahamad Yani Ranius, S.Kom.,MM  
NIDN : 0210116701  
Pangkat/Golongan : Lektor / IIIIC  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Alamat : Jl. A. Yani No.12 Plaju Palembang 30264

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul **Implementasi Kebijakan Publik Tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Kota Palembang)** yang diusulkan dalam skim penelitian Dosen Pundamental PT untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 23 Mei 2016

Mengetahui

Direktur LPPM



(Dr. H. Hardivansyah M.Si)  
NIP/NIK : 199610181992031008

Yang Menyatakan,



(Ahmad Yani Ranius, S.kom., MM)  
NIDN : 0210116701